

TAJUK RENCANA

Pembukaan Tempat Wisata

ANGIN segar untuk pelaku usaha hotel dan pariwisata telah dihembuskan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang mempersilakan para pelaku usaha wisata membuka kembali usahanya. Namun dengan catatan mereka tidak hanya harus tetap menerapkan protokol kesehatan tetapi juga harus menerapkan QR-Code. Ini dimaksud untuk memudahkan *tracing* bila kemudian ditemukan kasus positif Covid-19.

Diungkapkan oleh Sri Sultan, keputusan Pemda DIY untuk memperpanjang masa tanggap darurat sampai 31 Juli mendatang tidak bertujuan untuk mempersulit operasionalnya kembali hotel dan objek wisata untuk mendatangkan wisatawan. Meskipun normal baru belum diterapkan di DIY, bukan berarti kegiatan perekonomian tidak bisa dilakukan. Karena tidak mungkin DIY akan diam saja dan menunggu sampai Covid-19 benar-benar hilang tanpa melakukan kegiatan ekonomi.

Bagi sejumlah daerah, sektor pariwisata memang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Wacana pembukaan kembali objek-objek wisata juga telah mengemuka di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Di antaranya Banyumas, Banjarnegara dan Kendal, bahkan Karanganyar sudah mulai membuka lagi objek wisata Grojogan Sewu.

Untuk itu, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengelola objek wisata. Di antaranya harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, harus ada *screening* pengunjung di pintu masuk, penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun, dan pembatasan sosial maupun fisik. Juga harus ada data pimpinan rombongan jika kunjungan kolektif, serta wajib membawa surat keterangan sehat, khusus bagi pengunjung asal luar

Jateng.

Sampai saat ini, juga masih banyak daerah menahan diri, belum akan membuka potensi kepariwisataan mereka. Selain karena masih ada zona merah di wilayah mereka, juga ada kekhawatiran bahwa wisatawan akan melahirkkan klaster baru penyebaran virus Korona. Karena itu, daerah-daerah tersebut tetap memperhatikan pembatasan-pembatasan dan penyesuaian-penyesuaian.

Untuk menghindari persentuhan tangan antarorang di masa pandemi Covid-19 ini, Bank Indonesia (BI) juga telah mengembangkan implementasi dan penggunaan transaksi secara nontunai di masyarakat melalui program *OR Code Indonesian Standard* (QRIS) di sektor pariwisata.

Kalau kita mau jujur, sebenarnya banyak pelajaran dan pengalaman sangat berharga dari musibah Covid-19 selama ini. Ibarat baju, sulit dibayangkan bagaimana kalau seluruh permukaan bumi ini hanya datar, tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada lembah. Juga sulit dibayangkan seandainya ada hamparan sawah maha luas tanpa pematang dan tanpa sekat-sekat. Bagaimana pula kalau kebun dan ladang tanpa batas-batas?

Sulit dibayangkan, seandainya selama pandemi Covid-19 ini tidak ada protokol kesehatan, tidak ada pembatasan-pembatasan, dan tidak ada penyesuaian-penyesuaian. Tentunya juga sangat sulit dibayangkan, bila pembatasan-pembatasan dan penyesuaian-penyesuaian itu tidak dilonggarkan.

Di sisi lain, juga harus ada kesadaran masyarakat bahwa pelanggaran-pelanggaran yang mulai diterapkan oleh pemerintah, tidak berarti bebas tanpa batas. Ibarat baju, jangan sampai ada kelonggaran yang mengakibatkan kita kedodoran. □

Virus Rapuh Mental

Suwarno Wisetrotomo

PANDEMI Covid-19 sudah mengepung kita memasuki bulan kelima. Jika mencermati suasana batin dan pergerakan sebagian masyarakat, dapat disimpulkan sementara bahwa batas toleransi tidak ke luar rumah, tertib protokol kesehatan, bekerja di/dari rumah, *gretex* berbagi kabar baik n hanya berkisar tiga minggu. Selepas itu, sejumlah orang mulai kehilangan kendali diri. Begitu mendapat kabar akan dilakukan pelonggaran, sebagian bersikap seperti keadaan sudah normal. Mulai berkerumun, di jalan, di rumah makan, di tempat wisata, dengan sikap longgar terhadap protokol kesehatan.

Ekonomi tertekan, seperti ketika dilanda krisis apapun, mulai berdampak pada kehidupan sosial. Sejumlah stimulasi dan bantuan pemerintah (sembako, bantuan langsung tunai, atau apapun namanya) di beberapa tempat menimbulkan kekacauan, bahkan kekerasan. Pemicunya persoalan lama: data tak akurat, berakibat salah sasaran. Itu semua menunjukkan kinerja aparat yang jauh dari profesional.

Etika

Sungguh cemas, menyaksikan orang-orang tak memiliki etika di jalan raya : bermotor atau bersepeda, lelaki atau perempuan, sendiri atau kerumunan, entah sedang memburu apa, menunjukkan perilaku *kemrungsung*. Menerabas lampu lalu lintas, mere-mehkan risiko. Menyerahkan keselamatan dirinya pada orang lain sungguh sikap banal dan absurd. Jalan raya menjadi potret derajat peradaban warganya. Jika orang-orang itu tidak mematuhi aturan tertib lalu lintas, mereka datang dari keluarga seperti apa? Mereka memiliki pengalaman pembelajaran dan pendidikan dari guru-guru dan sekolah seperti apa?

Itulah sebagian ironi yang muncul demikian cepat, di tengah situasi yang seharusnya dipenuhi laku prihatin. Situasi sekarang ini memang 'perih di



baik-baik saja, tidak sedang terjadi apa-apa; berkumpul, tanpa jarak, tanpa masker, tak mengindahkan protokol kesehatan, dengan alasan hanya karena tak tahan bosan. Tetapi tanpa memiliki kemampuan mengelola perasaan bosan, rindu, sepi, mereka menjadi sosok rapuh lahir batin.

Pangkal persoalannya tentu pendidikan, proses belajar-mengajar. Akan tetapi pendidikan tidak hanya apa yang terjadi di sekolah. Kehidupan di keluarga n pola komunikasi, perhatian orang tua, pendidikan keluarga n menjadi sekolah pertama yang dialami setiap orang.

Jika orang-orang yang *kemrungsung* itu ternyata sebagian adalah para orang tua terus bagaimana? Patut diduga dengan kuat, bahwa sebenarnya mereka itulah, yang pertama-tama menjangkitkan dan menularkan 'virus rapuh mental' itu kepada anak-anaknya. Mereka tak sempat mengingatkan pentingnya etika di ruang publik, termasuk jalan raya. Lupa memberitahu indahnya berbeda, berempati, menghargai, dan berbagi. Tak sempat mengenalkan pada pergaulan kesenian agar terasah jiwanya.

Patut diduga, orang tua seperti itu tak mampu menjelaskan dengan baik terkait posisi menulari atau tertulari (virus). Mereka pantas kita ingatkan untuk *nggegulang* kalbu. Rasa cemas ini harus dikelola agar menjadi daya yang menumbuhkan keberanian untuk saling mengingatkan. □

*) **Dr Suwarno Wisetrotomo**, Ketua Prodi Seni Program Magister, Pascasarjana ISI Yogyakarta / Kurator Galeri Nasional Indonesia.

Syarat Menulis Opini

Para penulis yang terhormat, Redaksi hanya akan memperhatikan tulisan artikel/opini yang dikirim ke opinikr@gmail.com dengan disertai CV dan copy identitas diri. Panjang tulisan sekitar 3.700 karakter atau 600 kata. Demi kelancaran bersama, tidak melayani pengiriman ke akun pribadi. Terimakasih

Tatanan Baru Tri-Pusat Pendidikan

KI HADJAR Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, mendirikan Perguruan Tamansiswa 3 Juli 1922 berpusat di Yogyakarta. Didirikan zaman kolonial, namun nilai-nilai luhur yang diajarkan masih sangat relevan pada zaman milenial. Menjelang satu abad Tamansiswa, perlu dilakukan pembaharuan, reaktualisasi dan revitalisasi. Agar mampu menjadi cucuk lampah kembali dalam restorasi, renaisans maupun perbaikan terhadap sistem Pendidikan Nasional yang berakar kuat pada budaya luhur nusantara.

Pendidikan mestinya bukan hanya tanggung jawab sekolah semata. Dan pandemi Covid-19 telah memaksa agar kegiatan pengajaran berpindah dari sekolah menjadi belajar di rumah. Namun memindahkan proses dan tanggung jawab pendidikan sepenuhnya di rumah tentu saja sangat memberatkan. Ki Hadjar Dewantara menerapkan 'Tri pusat Pendidikan' di sekolah, keluarga, dan masyarakat sekaligus. Pendidikan formal, nonformal dan informal perlu dilakukan sepanjang hayat dan dimanapun secara sinergis dan seimbang. Setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah. Konsep internasional terkini, *Education of Sustainable Development (ESD)*, dan *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebenarnya telah tercirikan dalam ajaran KHD. Konsep Tri-Pusat Pendidikan juga dikembangkan di Muhammadiyah oleh KH Ahmad Dahlan maupun Nahdlatul Ulama oleh KH Wahid Hasyim.

Masyarakat 5.0

Revolusi konsep pendidikan 4.0 dalam kehidupan virtual masyarakat 5.0 juga harus menyesuaikan revolusi industri 4.0 berbasis teknologi informasi canggih. Termasuk penggunaan kecerdasan buatan, data terpadu, jarak jauh, mobile, games, yang nampaknya sesuai untuk

Cahyono Agus

generasi milenial, emas dan futuristik. Namun demikian, ternyata justru menjadikan insan manusia cenderung impersonal, ego-sentris, kurang interaktif, kurang berbudaya, kehilangan empati, kehilangan nilai sosial kemanusiaan. Pembelajaran jarak jauh harus disempurnakan, meskipun tidak dengan tatap muka, namun harus tetap dengan tatap hati. *Wiraga, wirama, wirasa* perlu diolah untuk mendidik kecerdasan otak, ke-trampilan tangan, dan kehalusan budi secara harmoni dan sinergis. Kebersamaan, kekeluargaan dengan sistem *among* yang bercirikan *asah, asih, asuh* perlu dikembangkan dengan Tri Pusat Pendidikan Terpadu.

Siswa TK, SD bisa lebih dioptimalkan untuk belajar memaknai syariat dan hakikat kehidupan dari rumah pada saat pandemi. Siswa SMP, SMA dan mahasiswa diharapkan bisa memaknai tarikat dan makrifat kehidupan dengan lebih mematuhi aturan, disiplin dan

tanggung jawab. Reformasi pendidikan perlu dilakukan bertahap. Kebijakan pendidikan tidak bisa diseragamkan begitu saja, karena keberagaman unsur pendidikan sangat tinggi. Dalam jangka panjang, kurikulum harus disesuaikan. Namun, dalam jangka pendek, capaian pembelajaran, metode penyampaian lebih mudah untuk disesuaikan dengan situasi kondisi terkini.

Ruang Keberagaman

Insan pendidikan didorong untuk mengembangkan keterampilan hi-

dup, kesehatan dan empati. Juga harus berani mengembangkan konsep *out of the box, within the system*. Reformasi kebijakan pendidikan perlu diperkokoh, namun tetap memberi ruang bagi keberagaman untuk berinovasi dan berkreasi mewujudkan *jalma kang utama* (manusia sejati). Bahwa pendidikan harus menajamkan potensi anak didik sesuai kodrat alam, kehendak jiwa, bakat, hobi, talenta, semangat secara merdeka. Selanjutnya bisa berkarya di masyarakat sesuai peran dan fungsinya.

Tatanan baru Tri Pusat Pendidikan kita harus berakar kuat pada budaya luhur bangsa sendiri, guna mempersiapkan peradaban baru Indonesia Emas. Taman Pendidikan Bersama 4.0 bagi anak-anak milenial pada era pandemi dan masa mendatang nampaknya menjadi media yang sesuai. Belajar, bekerja dan beribadah secara bersama di Tri-Pusat Pendidikan terpadu. □

*) **Prof Dr Ki Cahyono Agus**, Ketua Pengurus Pusat Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa, Guru Besar UGM.

Pojok KR

Gubernur DIY mempersilakan pembukaan kembali tempat-tempat wisata.

-- Jangan keablasan.

Cegah Covid-19, ribuan sapi di Gunungkidul disemprot disinfektan.

-- Juga cuci kaki?

Kemendag bantu alat kesehatan, APD dan sembako untuk 7 pasar di DIY.

-- Memang harus peduli.

Berabe



Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (F Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Lembaga Paud di Tengah Pandemi

TAHUN ajaran baru benar-benar sangat berat. Tak terkecuali bagi praktisi dan penyelenggara pendidikan Paud. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah, pertama, orang tua belum merasa penting mendaftarkan anaknya di sekolah Paud, berbeda dengan jenjang SD ke atas. Kedua, seandainya harus mendaftarkan anaknya di Paud, dan pembelajarannya tetap dengan daring, maka ini menjadi beban berlipat bagi orang tua, yaitu beban mendampingi penuh saat keseharian belajar dan juga beban keharusan membayar biaya sekolah.

Ketiga, kekhawatiran orang tua akan keselamatan dan kesehatan anaknya, jika tetap harus masuk sekolah. Ini adalah masalah pokoknya. Kalaupun ada sekolah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan penuh, tetap belum ada jaminan. Karena bagaimanapun tipe anak usia dini, tidak bisa secara kaku diperlakukan *physical distancing* saat proses pembelajaran di sekolah.

Berangkat dari masalah psikologis, sosial, ekonomi dan kesehatan seperti itu, maka para orang tua kemungkinan besar akan memilih untuk menunda dulu mendaftarkan anaknya ke lembaga Paud. Jika demikian maka pada awal tahun ajaran ini akan banyak lembaga Paud yang tidak mendapatkan peserta didik ataupun jika ada yang mendaftar akan jauh dari kuota yang tersedia, karena alasan di atas.

Kemungkinan besar dampak yang akan muncul dari situasi dan kondisi di atas adalah pertama, jika lembaga Paud tetap menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan jumlah siswa seadanya, tentunya akan berakibat pada beratnya beban operasional lembaga, karena sangat tidak mudah untuk menarik pembiayaan

dari orang tua. Tapi jika lembaga itu di bawah yayasan yang besar dan mapan, tidak menjadi masalah dan berani menggratiskan biaya pendidikan. Padahal tidak sedikit lembaga Paud itu setingkat RT dan RW yang seluruh pendidiknya berstatus honorer dan pembiayaan operasionalnya mengandalkan dari orang tua siswa.

Kedua, selama ini pemerintah sudah memberikan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) ke lembaga Paud, dengan salah satu syaratnya minimal sembilan peserta didik. Begitu juga syarat mendapatkan tunjangan sertifikasi guru yang mengharuskan minimal perbandingan satu guru harus mampu 15 anak. Padahal sangat banyak sekolah dengan guru bersertifikasi lebih dari satu. Jika kebijakan dan syarat-syarat pada saat normal ini tetap diberlakukan, maka dalam kondisi seperti sekarang akan sangat berat. Mungkin sekali nanti banyak yang tidak mendapat BOP dan tunjangan sertifikasi. Bisa jadi ini akan menambah 'nelangsa sekolah dan guru Paud'.

Kalau tidak ada kebijakan strategis untuk menyelamatkannya maka bisa jadi lembaga Paud, baik yang formal seperti TK atau nonformal seperti Kelompok Bermain, TPA dan SPS adalah lembaga pendidikan yang akan pertama kali tumbang dalam pandemi Covid-19. Untuk itu agar dibuat kebijakan dan strategi dari pemerintah baik pusat maupun daerah, untuk menyelamatkan lembaga Paud baik dengan insentif khusus guru terdampak ataupun syarat-syarat mendapatkan BOP dan tunjangan sertifikasi bagi guru diperlonggar. Juga bisa memastikan bahwa kebijakan pusat dan daerah bisa selaras. □

Imam Muhtadi SAG, *Pendidik dan Pengelola Lembaga Paud Taat Insan Mulia, Yogya.*

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggung-jawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.044.0854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Isahaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiantono SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.

Magelang: Jalan Achmad Yani No 193, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.